

## RELEVANSI KONSEP DAN GERAKAN PERTANIAN KELUARGA (*FAMILY FARMING*) SERTA KARAKTERISTIKNYA DI INDONESIA

### *Family Farming Concept and Movement Relevance and Their Characteristics in Indonesia*

Syahyuti\*

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. E-mail: syahyuti@gmail.com*

Naskah diterima: 3 Agustus 2016

Direvisi: 18 Agustus 2016

Disetujui 31 Oktober 2016

#### ABSTRACT

The United Nations established 2014 as the international year of family farming aimed to encourage public awareness and understanding on family farming issues and how to find effective ways to support them. Family farming is run by the majority of farmers in the world and it contributes greatly to food provision, environmental health, poverty alleviation, and farmers' welfare. Indonesia also needs to support family farming because of its unique characteristics. This paper reviews various topics related with family farming. Indonesia needs to increase knowledge to all stakeholders related to with family farming in terms of cooperation, movement and program to sustain and develop it in the future. Therefore, we need a family farming index in accordance with all stakeholders' views. Indonesian family farming index consists of input, process, and output aspects.

**Keywords:** *family farming, index, small farmers*

#### ABSTRAK

PBB telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun internasional pertanian keluarga dengan tujuan menarik perhatian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan pertanian keluarga dan menemukan cara yang efektif untuk mendukungnya. Pertanian keluarga dijalankan oleh sebagian besar petani di dunia dan terbukti memberikan sumbangan yang besar bagi penyediaan pangan, kesehatan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan petani. Indonesia juga membutuhkan kesadaran dan perlunya dukungan terhadap pertanian keluarga karena memiliki karakter masalah pertanian keluarga yang khas. Tulisan ini merupakan tinjauan *review* dari berbagai bahan. Indonesia membutuhkan peningkatan pengetahuan bagi seluruh pihak terkait dengan pertanian keluarga agar dapat membangun kerja sama, gerakan, dan program untuk menjaga dan mengembangkannya ke depan. Untuk itu dibutuhkan sebuah indeks pertanian keluarga yang bisa menjadi pegangan dan kesepakatan semua pihak. Indeks pertanian keluarga untuk Indonesia merupakan sebuah variabel komposit yang mencakup aspek input, proses, dan sekaligus output dari pertanian keluarga.

**Kata kunci:** *indeks, pertanian keluarga, petani kecil*

#### PENDAHULUAN

Pertanian keluarga (*family farming*) merupakan gerakan internasional yang di Indonesia masih menjadi wacana baru, di mana berbagai pihak sedang berupaya mendapat pemahaman dan agenda kerja yang jelas. Badan dunia PBB telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun internasional pertanian keluarga (*International Year of Family Farming*) yang dikenal dengan "IYFF 2014", dengan tujuan "... to reposition family farming at the centre of agricultural, environmental and social policies in the national agendas by identifying gaps and opportunities to promote a shift towards a more equal and balanced development. to defend and

*strengthen family farming as a viable alternative to eradicate the hunger, malnutrition and poverty suffered by 1000 million people worldwide"* (WRF 2015)

Kegiatan IYFF 2014 terdiri dari berbagai bentuk aktivitas, yaitu promosi, diskusi, dan kerja sama di level nasional, regional, dan global untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tantangan yang dihadapi oleh petani skala kecil (*smallholders*) dan menemukan cara yang efektif untuk mendukung pertanian keluarga. Sebagai gerakan internasional, IYFF 2014 didukung pula oleh organisasi World Rural Forum (WRF) dan 360 lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*) di seluruh dunia (Quintana 2014).

Indonesia memiliki kondisi pembangunan pertanian yang juga membutuhkan kesadaran dan perlunya dukungan terhadap pertanian keluarga. Namun demikian, karakter masalah pertanian keluarga yang dihadapi Indonesia memiliki persoalan sendiri sehingga harus didekati dengan strategi yang agak berbeda.

Semenjak dahulu, Indonesia cenderung menerima dan mengadopsi berbagai konsep yang menjadi gerakan internasional terutama yang disebar oleh lembaga resmi dunia. Contohnya, konsep pengentasan kemiskinan, gender, pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, pertanian ramah lingkungan, penyuluhan partisipatif, *Millenium Development Goals* (MDG), dan pemberdayaan. Beberapa ide telah menjadi agenda nasional secara resmi dan masuk dalam dokumen kebijakan pemerintah. Ide tersebut telah menjadi tujuan nasional yang diikuti dengan program dan proyek, dilengkapi dengan strategi, pendekatan, dan pengembangan indikator untuk mengukur pencapaiannya. Namun, khusus untuk ide dan gerakan pertanian keluarga, saat ini masih pada tahap awal pengenalan dan sosialisasi. Dari sisi konsep, beberapa ide dan gerakan dalam pembangunan pertanian dan perdesaan selama ini dalam beberapa elemen relatif sejalan dengan konsep "pertanian keluarga".

Tulisan ini berupaya memaparkan apa dan bagaimana ide, tujuan, serta strategi pertanian keluarga yang diperjuangkan oleh forum internasional. Selanjutnya, dipaparkan bagaimana relevansi dan urgensi kegiatan ini di Indonesia karena kondisi pertanian Indonesia yang khas, serta karakteristik dasar dan rumusan untuk pengukuran level keberhasilan pertanian keluarga di Indonesia. Pada bagian akhir juga disampaikan usulan untuk pengukuran indeks pertanian keluarga, sehingga kegiatan ini menjadi lebih sistematis dijalankan dan terukur kemajuannya.

### **KONSEPSI DAN GERAKAN PERTANIAN KELUARGA (*FAMILY FARMING*)**

Kelahiran konsep dan gerakan "*family farming*" diawali di Spanyol ketika timbul ketakutan akan hilangnya pertanian keluarga digantikan oleh perusahaan korporat besar yang menimbulkan banyak kerusakan alam dan ketimpangan ekonomi. Dalam pengertian yang sangat umum, pertanian keluarga (*family farming*) adalah "... a farm owned and operated by family", atau pertanian yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga, bukan oleh perusahaan

(WRF 2015). Menurut batasan yang digunakan USDA, pertanian keluarga memproduksi komoditas pertanian untuk dijual maupun cukup untuk kebutuhan keluarga sendiri, sedangkan tenaga kerja berasal dari dalam keluarga dan dari luar (*hired labor*).

Batasan FAO (2014) paling banyak digunakan, pertanian keluarga didefinisikan sebagai "*form of organizing crop and forest production as well as fishery, livestock raising, and aquaculture, which is managed and directed by a family, which mainly depends on family labor of both women and men. The family and the holding are linked, co-evolve, and combine economic, environmental, reproductive, social, and cultural functions.*" Ini merupakan gambaran sebuah pertanian yang dikelola dengan berbagai prinsip yang selaras dengan alam dan harmonis pada komunitas, dengan tetap menyandarkan kepada bertani sebagai sebuah aktivitas yang menyenangkan dan memiliki kedalaman sosio-kultural (*way of life*).

Pertanian keluarga diberikan harapan yang sangat besar sehingga ada jargon bahwa "pertanian keluarga adalah alternatif masa depan dunia" (*family farming - our alternative for the future*). Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 5–7 Oktober 2011 menghasilkan sebuah *Final Declaration of Family Farming World Conference* yang menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga (*International Year of Family Farming/IYFF*). Ini merupakan wujud pengakuan atas pentingnya pertanian keluarga dalam menjaga pasokan pangan dunia, mengurangi kemiskinan global, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di dunia (FAO 2014). Perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga juga bertujuan untuk meningkatkan perhatian dunia kepada pertanian keluarga dan pertanian skala kecil atas peran penting keduanya dalam menghapuskan kelaparan, meningkatkan mata pencaharian petani, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, melindungi lingkungan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di perdesaan. Pertanian keluarga akan memenuhi fungsi untuk memenuhi pangan dunia (*feeds the world*), menciptakan kesejahteraan (*generates well being*), memerangi kemiskinan (*combats poverty*), serta melindungi biodiversitas dan lingkungan (*protects biodiversity and the environment*) (Quintana 2014).

Tujuan selengkapnya gerakan IYFF 2014 adalah untuk (1) mendukung pembangunan pertanian, lingkungan, dan kebijakan sosial yang kondusif untuk mewujudkan pertanian keluarga; (2) meningkatkan pengetahuan, komunikasi, dan

kesadaran publik; (3) memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan, potensi, serta hambatan teknis pertanian keluarga; serta (4) menciptakan sinergi untuk keberlanjutannya (Quintana 2014). Pada hakekatnya, "... *family farming as a guarantee of food security and food sovereignty and a source of economic, social and territorial development*" (WRF 2015).

Penetapan Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014 tidak terlepas dari upaya menempatkan kembali posisi pertanian keluarga di dalam pusat kebijakan-kebijakan pertanian, lingkungan, dan sosial dalam agenda nasional dengan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang-peluang menuju pembangunan yang lebih berkeadilan dan seimbang. Dalam kegiatan ini, semakin banyak diskusi dan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan global untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai tantangan yang dihadapi petani kecil, serta membantu mengidentifikasi cara-cara yang efisien untuk mendukung keluarga-keluarga petani/nelayan kecil, di antaranya dengan mendukung terbangunnya kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertanian berkelanjutan. Selain itu, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pertanian keluarga, potensi-potensi dan hambatan serta adanya jaminan dukungan teknis.

Pertanian keluarga meliputi berbagai kegiatan pertanian berbasis keluarga dan yang terkait dengan bidang-bidang pembangunan perdesaan. Pertanian keluarga sebenarnya adalah sebuah perangkat untuk mengoordinasikan produksi di pertanian, kehutanan, perikanan laut dan darat, serta kegiatan penggembalaan yang dikelola dan dijalankan oleh sebuah keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, serta mengandalkan tenaga kerja keluarga (Toader dan Roman 2015).

Pertanian keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya karena pertanian keluarga dan pertanian skala kecil tidak dapat dilepaskan dari ketahanan pangan dunia. Pertanian keluarga memelihara produk-produk pangan tradisional dan menyumbang kepada keseimbangan gizi, menjaga keanekaragaman pertanian dunia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Gerakan ini merupakan sebuah peluang untuk mendorong perekonomian lokal, khususnya jika telah tercipta kebijakan-kebijakan yang bertujuan kepada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya para pemerintah di dunia mendukung pertanian keluarga melalui

kebijakan-kebijakan nasionalnya, kemudian bersama-sama di tingkat regional dan dunia bersinergi memajukan pertanian keluarga. Gerakan pertanian keluarga memberikan perhatian kepada petani, keluarga petani, dan buruh tani; satu objek yang selama ini agak terabaikan karena pemerintah lebih mengutamakan pencapaian produksi, produktivitas, dan swasembada komoditas tanaman pangan.

Berbagai referensi menunjukkan jargon positif terhadap pertanian keluarga, di antaranya adalah "*Family farming is our alternative for the future*", "*Family farming feeding the world, caring for the earth*". Konsep "*family farming*" sebagai konsep yang paling baru sesungguhnya dapat dipandang sebagai bungkus baru dari isi yang sedikit banyak sejalan dengan berbagai konsep lain, di antaranya adalah konsep "*peasant*" dalam konteks *vis a vis* terhadap "*farmer*", atau petani kecil dalam kontra dengan petani besar. Konsep lain adalah "pertanian akroekologis" dan "pertanian rakyat", serta juga relatif sejalan dengan konsep bertani sebagai *way of life versus* bertani sebagai bisnis.

Menurut Bastian (2011), pertanian keluarga menggunakan energi lebih murah, sensitif pada risiko, dan memproteksi lingkungan. Bahkan, studi Medina et al. (2015) di Brazil melihat bahwa pertanian keluarga lebih unggul dan menyebutnya sebagai sektor yang kompetitif (*more competitive sector*) karena berkontribusi langsung kepada pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Pertanian keluarga sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan kehidupan perdesaan dan juga mempromosikan kehidupan yang sehat (*healthy lifestyle*) dan eksis, baik di negara maju maupun berkembang (Toader dan Roman 2015).

Pada tahun 2016, disepakati untuk menindaklanjuti gerakan ini melalui *tagline* "IYFF+10", yakni konsensus untuk melanjutkan gerakan ini sampai 10 tahun ke depan, yakni tahun 2026 (IFAD 2016). Setiap negara akan bekerja sama meningkatkan dukungan publik di bawah *Family Farming National Committees* di negara masing-masing, menciptakan pedoman untuk promosi, serta meningkatkan relasi antara penelitian dan organisasi-organisasi pertanian keluarga (*Family Farming Organisations*). Organisasi petani didorong untuk mengambil bagian dalam kebijakan politik serta mampu bekerja sama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional. IFAD merupakan pihak utama dalam mempromosikan dan mengimplementasikan Program "IYFF" maupun "IYFF+10".

## Sebaran dan Permasalahan Pertanian Keluarga di Dunia

FAO melaporkan bahwa pertanian keluarga mencakup lebih dari 570 juta usaha pertanian di dunia yang dijalankan oleh lebih dari 500 juta keluarga (Lowder et al. 2014). Semua ini menyumbang setidaknya 56% dari total produksi pertanian dunia. *"Family farming is the predominant form of agriculture both in developed and developing countries"* (FAO 2017). Jumlah pertanian keluarga menjadi dominan karena batasan yang digunakan cukup luas, yakni mencakup pertanian *"... range from smallholder to medium-scale farmers, and include peasants, indigenous peoples, traditional communities, fisher folks, mountain farmers, pastoralists and many other groups representing every region and biome of the world"* (Lowder et al. 2014; FAO 2017).

Peran pertanian keluarga sangat signifikan. Di Brazil misalnya, pertanian keluarga menyumbang 40% dari total produksi pertanian nasional, hanya dari lahan yang luas totalnya kurang dari 25% lahan pertanian nasional. Di Fiji, proporsinya lebih besar, yakni 84% produksi nasional dari total lahan yang tidak sampai setengah (47,4% dari total lahan nasional). Untuk Amerika, pertanian keluarga menyumbang 84% dari seluruh produksi nasional, dihasilkan dari 78% lahan, di mana 98% usaha pertanian tergolong sebagai pertanian keluarga. Data ini menunjukkan bahwa pertanian keluarga lebih produktif, mampu memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan luasan lahan yang lebih kecil.

Secara keseluruhan di tingkat dunia, sekitar 1,5 miliar petani hidup dari lahan kecil kurang dari 2 hektare, 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput, 100–200 juta orang menjadi penggembala ternak, 100 juta orang berprofesi sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya merupakan kelompok masyarakat adat yang sebagian besar bertani (FAO 2017). Selain itu, masih ada 800 juta orang bercocok tanam di perkotaan. Pertanian keluarga merupakan basis produksi pangan yang berkelanjutan, dengan pengelolaan lingkungan dan lahan serta keanekaragaman hayatinya, dan menjadi basis pelestarian warisan sosial-budaya yang penting dari bangsa-bangsa dan komunitas perdesaan.

Pertanian keluarga berperan penting di Eropa, namun jumlahnya mulai menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kemampuan resiliensi (*resilience*) pertanian keluarga untuk bertahan dalam jangka panjang sekaligus beradaptasi terhadap perubahan luar.

Darnhofer et al. (2016) mendapatkan dua perspektif penyebabnya, yakni peran pertanian keluarga dalam dinamika ekologi dan peran aktor petani itu sendiri dalam ranah struktur sosial masyarakat setempat. Ia mengelompokkan ini menjadi dikotomi *"structure/agency"* dan *"ecological/social"*.

Petani keluarga di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh krisis pangan yang berkaitan dengan krisis keuangan, bahan bakar, dan perubahan iklim. Banyak kebijakan publik kurang tanggap terhadap kebutuhan petani kecil dan keluarganya. Pencaplokan lahan menjadi ancaman terbesar bagi pertanian keluarga dan produksi pangan secara berkelanjutan. Banyak pertanian keluarga, termasuk petani kecil, nelayan kecil/tradisional, masyarakat adat, dan penggembala, terampas asetnya melalui pengambilalihan (akuisisi) lahan-lahan atau daerah tangkapan mereka untuk dijadikan perkebunan tanaman ekspor untuk industri dan tanaman pangan, atau dijadikan kawasan komersial. Selain itu, pertanian keluarga berskala kecil ini mengalami keterbatasan akses ke pembiayaan dan pasar, memiliki daya tawar yang lemah atas harga-harga produk mereka, sedangkan perlindungan dan pemberdayaan keluarga-keluarga petani kecil masih terbatas dalam implementasinya.

Selain itu, pemahaman pengambil kebijakan sering kurang memadai. Di Indonesia misalnya, dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, buruh tani tidak masuk sebagai objek yang dilindungi dan diberdayakan. Buruh tani umumnya tidak masuk dalam organisasi (Berdegue 2000), kurang diperdulikan dalam penyuluhan, bahkan juga tidak terdata oleh statistik.

Menurut Asin (2014), pertanian keluarga memiliki banyak sisi-sisi positif. *Pertama*, pertanian keluarga memberi makan dunia. Saat ini, 70% pangan dunia diproduksi oleh *family farmers*. Pertanian keluarga sebagian berskala besar dan sebagian kecil. Pertanian skala kecil sesungguhnya lebih produktif dalam konteks output per areal lahan dan juga dalam penggunaan energi (*in terms of output per unit of land and energy use*).

*Kedua*, pertanian keluarga menciptakan kesejahteraan. Saat ini, 40% rumah tangga dunia bergantung dari usaha pertanian. Dari 3 miliar penduduk desa di negara berkembang, sebanyak 2,5 miliar bekerja di pertanian.

*Ketiga*, pertanian keluarga melawan kemiskinan. Menurut data World Bank, pertumbuhan GDP dari pertanian mampu mengurangi kemiskinan dua kali lebih banyak

dibanding sektor lain. Oleh karena itu, pertanian keluarga diyakini PBB sebagai kunci dalam memerangi kelaparan (*UN's Zero Hunger Challenge and the UN post-2015 Sustainable Development Goals*).

*Keempat*, pertanian keluarga menjaga keragaman biodiversitas dan lingkungan. Pertanian keluarga yang menanam beragam komoditas dan varietas pada satu hamparan adalah sumber daya genetik yang sangat kaya. Mereka mengusahakan beragam tanaman dengan karakteristik yang berbeda, menggunakan benih dan bibit ternak yang adaptif dengan lingkungan setempat, dengan prinsip agro-ekologis, sehingga menyokong pertanian yang sehat (*the healthy functioning of ecosystems*), juga lebih tahan terhadap tekanan iklim. Pertanian keluarga juga berkontribusi kepada sosio kultural masyarakat desa dengan segala nilai-nilai kulturalnya. Koltun et al. (2015) mengingatkan bahwa untuk pertanian keluarga semestinya tidak menggunakan indikator output dalam menilainya.

Namun demikian, kondisi yang dihadapi saat ini secara umum bahwa keberadaan pertanian keluarga dipengaruhi oleh krisis pangan, finansial, dan bahan bakar; serta perubahan iklim (WRF 2016). Kebijakan yang dibuat pemerintah belum sesuai untuk kebutuhan pertanian keluarga, di mana model ekonomi dan kebijakan pemerintah merugikan pertanian keluarga. Gejala pengambilalihan lahan (*land grabbing*) merupakan ancaman terhadap pertanian keluarga dan produksi pangan berkelanjutan. Banyak lahan pertanian keluarga (*smallholders, indigenous communities, and shepherds*) diakuisisi untuk usaha tanaman ekspor. Keluarga-keluarga petani yang lemah dalam akses dan kontrol pasar serta posisi tawarnya, berhadapan dengan pihak-pihak yang kuat.

Petrini et al. (2016) melaporkan bahwa di Barzil, ekspansi korporat besar pabrik tebu yang memproduksi ethanol menekan pertanian keluarga untuk menyewakan atau menjual lahan-lahan mereka. Namun, para pemangku kepentingan pembangunan pertanian memiliki persepsi positif terhadap pertanian keluarga karena lebih menjamin keragaman biodiversitas, tidak hanya mendukung sumber daya alam melainkan merupakan basis strategi untuk ekonomi nasional. Sementara, penelitian Gregor (1982) di Amerika dengan menggunakan *multivariate model* mendapatkan bahwa pertanian skala kecil mulai tergerus karena berbagai sebab mulai dari kurang kompetitif dalam faktor produksi, juga tidak lagi dilindungi dari sumber-sumber daya tradisional misalnya

intensifitas tenaga kerja dan efisiensi produksi. Bersamaan dengan ini tekanan dari pertanian skala besar yang dikelola sebagai "*the factory farm*" juga semakin besar.

### **Peran Penting Perempuan dan Generasi Muda dalam Pertanian Keluarga**

Perempuan memiliki posisi yang sangat vital dalam pertanian keluarga. Perempuan memegang peran penting dalam produksi dan penyediaan pangan bagi keluarga, menjaga lingkungan dan tradisi, serta menerapkan teknik-teknik pertanian yang rendah input kimia sintetis sehingga efisien. Banyak perempuan yang telah melakukan praktik pertanian organik/alami. Para perempuan berada di depan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik, mulai dari seleksi benih, panen, penyimpanan, dan sebagainya. Peran tradisional perempuan selama ini terlibat langsung dalam proses produksi dan sekaligus menyiapkan makanan untuk keluarga dan komunitasnya. Perempuan juga berperan penting dalam konservasi genetik (*genetic conservation*), di mana mereka terlibat langsung dalam menanam, pemanenan, penyimpanan, dan pengolahan pangan. Perempuan menjaga lingkungan dan tradisi, serta menerapkan teknik-teknik pertanian yang rendah input dan input yang efisien. Studi Seuneke dan Bock (2015) di Belanda mendapatkan bahwa perempuan memiliki kemampuan multifungsi (*multifunctional entrepreneurs*). Ada tiga peran utama perempuan, yaitu membawa praktik baru ke pertanian, menyediakan akses kepada jaringan, dan melakukan negosiasi dengan keluarga petani lain.

Namun, umumnya perempuan kurang dihargai dalam kebijakan karena kurang sensitif kepada ketutuhan khas perempuan. Perempuan juga lemah dalam hal akses kepada lahan, pasar, pendidikan, dan politik di mana suara mereka jarang didengar dalam organisasi petani (*farmers' organizations and in government bodies*). Pada tingkat rumah tangga dan masyarakat mereka mengalami *gender-based discrimination*. Hal ini semua menghalangi kontribusi mereka kepada pembangunan pertanian.

FAO mengingatkan bahwa untuk memperkuat eksistensi pertanian keluarga, perlu perhatian kepada perempuan dan pemuda tani. Di negara berkembang, perempuan merupakan 43% dari seluruh tenaga kerja pertanian, bahkan di beberapa negara proporsinya lebih dari 80% (FAO 2014). Permasalahan perempuan adalah mereka kurang akses kepada fasilitas kredit dibandingkan laki-laki. FAO mencatat bahwa

hanya 10% kredit di sub-Sahara Afrika tersedia untuk perempuan (FAO 2011). Di negara-negara berkembang, perempuan adalah tulang punggung pertanian, namun mereka belum memiliki akses yang seimbang.

Generasi muda di pertanian juga berperan sangat penting bagi keberlanjutan pertanian di seluruh dunia. Namun, pemuda petani memiliki keterbatasan dalam dukungan ekonomi dan pendidikan yang dapat memotivasi mereka agar memajukan pertanian di desa. Berbagai keterbatasan itu membuat pertanian tidak menarik sehingga pemuda lebih memilih meninggalkan desa tanpa menyadari pentingnya melanjutkan, menciptakan, dan menghasilkan kehidupan di lingkungan pertanian mereka sendiri dengan penuh martabat (Leavy dan Smith 2010).

Golongan muda merupakan masalah sendiri. Saat ini dengan populasi lebih kurang seperlima populasi dunia, namun mereka enggan berkarir di sektor pertanian. Ide yang berkembang untuk menarik mereka ke dalam pertanian, selain berusaha mendorongnya menjadi petani secara langsung, juga ditawarkan untuk profesi lain yang tidak langsung, yakni pengusaha pangan (*food entrepreneurs*), ilmuwan, dan penyuluh pertanian (*extension agents*). Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan, maka pemerintah perlu membantu petani muda untuk akses kepada lahan, kredit perbankan, pendidikan, serta keterampilan teknis yang memadai (FAO 2014).

### GAMBARAN PERTANIAN KELUARGA DI INDONESIA

Dalam sepuluh tahun terakhir (2003–2013), jumlah rumah tangga petani di Indonesia mengalami penurunan. Hasil pendataan BPS menunjukkan penurunan rumah tangga petani dari 31,2 juta pada tahun 2003 menjadi 26,1 juta rumah tangga pada 2013. Namun, penurunan jumlah rumah tangga petani diikuti dengan makin meningkatnya jumlah perusahaan pertanian pada periode yang sama, yaitu dari jumlah 4.011 perusahaan (2003) menjadi 5.486 perusahaan (2013). Dengan kata lain, perusahaan pertanian semakin mendominasi ekonomi pertanian di Indonesia. Dalam waktu sepuluh tahun jumlah perusahaan pertanian meningkat 36,8%, sebaliknya rumah tangga pertanian gurem turun 25,0% dan juga rumah tangga pertanian pengguna lahan turun sebesar 15,4%.

Sesuai dengan batasan dalam Sensus Pertanian 2013, rumah tangga (RT) petani

gurem adalah RT pertanian pengguna lahan dengan penguasaan <0,5 ha (mencakup lahan pertanian dan lahan bukan pertanian), RT budi daya ikan, penangkapan ikan, pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan jasa pertanian bukan pengguna lahan. RT Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.

Tabel 1. Perbandingan jumlah dan perubahan rumah tangga pertanian, 2003 dan 2013

Aspek	ST 2003	ST 2013	Perubahan (%)
RT petani gurem	19.015.051	14.248.870	- 25,0
RT usaha pertanian pengguna lahan	30.419.582	25.751.266	-15,4
RT usaha pertanian	31.232.184	26.135.469	-16,3
Perusahaan pertanian	4.011	5.486	36,8

Sumber: BPS (2004, 2014)

RT usaha pertanian pengguna lahan adalah RT usaha pertanian yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, budi daya ikan/biota lain di kolam air tawar/tambak air payau, dan penangkaran satwa liar. Perusahaan pertanian berbadan hukum adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba. Pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Dari segi penguasaan lahan, rata-rata penguasaan lahan untuk di atas 30 ha meningkat 22,8%, sedangkan untuk luasan lainnya menurun. Ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia semakin timpang dalam penguasaan lahan. Dengan kata lain, perusahaan pertanian semakin menyingkirkan pertanian keluarga.

Secara keseluruhan, rumah tangga pertanian berkurang sebesar 16,3% dalam kurun waktu sepuluh tahun. Penyebabnya adalah selain karena perbedaan batasan antarsensus

pertanian, juga karena petani keluar dari sektor pertanian karena usaha pertanian tidak ekonomis dan tidak mencukupi untuk kesejahteraan keluarga. Sebagian tetap bertani, namun hanya menjadi buruh tani. Dalam sensus pertanian, buruh tani yang tidak mengelola lahan sendiri, tidak menyewa, dan juga tidak menyakap lahan orang lain; tidak dicatat sebagai rumah tangga pertanian. Dalam ST 2003, unit pencacahan mencakup seluruh rumah tangga yang memiliki kegiatan pertanian, sedangkan pada ST 2013 hanya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk usaha, baik dijual maupun ditukar.

Tabel 2. Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT), 2003 dan 2013

Luas penguasaan (ha/RT)	ST 2003	ST 2013	Perubahan (%)
<1	9,4	4,3	-53,8
1–1,9	3,6	3,6	-1,5
2–4,9	6,8	6,7	-1,2
5–9,9	4,8	4,6	-4,8
10–19,9	3,7	3,7	1,0
20–29,9	1,7	1,6	-3,3
>30	1,3	1,6	22,8
Jumlah	31,2	26,1	-16,3

Sumber: BPS (2004, 2014)

Fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Studi Hill (1993) di Eropa dengan menggali data dari 59.000 unit usaha pertanian di 12 negara, mendapatkan bahwa lahan pertanian keluarga juga cenderung semakin kecil dan sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga juga semakin menurun. Namun, studi Roudart dan Dave (2017) di Nigeria mendapatkan bahwa pertanian keluarga sesungguhnya tetap dapat mengembangkan investasi pada lahan apabila kondisi yang dihadapi kondusif.

Namun demikian, untuk kasus Indonesia, sesungguhnya saat ini kekhawatiran terhadap hilangnya pertanian keluarga belum memiliki alasan yang sangat kuat karena pertanian keluarga akan tetap eksis dalam jangka lama dan sulit dihapuskan. Namun, meskipun masih dikelola dengan manajemen keluarga dan mengandalkan tenaga kerja dalam keluarga sendiri, prinsip bisnis sudah diterapkan termasuk penggunaan input yang berlebihan untuk meningkatkan produksi setinggi-tingginya. Akibatnya, nilai-nilai kultural keharmonisan bertani dengan alam, dalam keluarga dan dengan komunitas menjadi hilang. Diduga bahwa isu yang lebih prioritas saat ini sesungguhnya adalah apakah petani dan keluarga petani

terlindungi, sejahtera, dan terhormat sebagai petani? Dengan kata lain, apakah petani dan keluarga petani Indonesia saat ini telah hidup bermartabat?

Meskipun jarang diwacanakan, namun permasalahan martabat ini diungkap dalam beberapa dokumen pemerintah. Dalam buku Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015–2045 (Kementan 2016) disebutkan bahwa visi pembangunan jangka panjang pertanian adalah “Mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur paling lambat pada tahun 2045”. Pertanian yang bermartabat berkenaan dengan tingkat harkat kemanusiaan petani Indonesia yang memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, terbebas dari ancaman rawan pangan dan kemiskinan, yang merupakan resultante dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Salah satu kekhususan SIPP adalah adanya tambahan frasa bermartabat di dalam visinya (hlm. 6). Disebutkan dalam dokumen ini bahwa “pembangunan pertanian pertama-tama harus ditujukan untuk mewujudkan pertanian yang bermartabat, tentu saja meliputi petani dan usaha taninya” (hlm. 50), juga “... pengembangan pertanian bermartabat yang memberi kemakmuran dan keadilan bagi pelaku usaha pertanian” (hlm. 147).

Negara berkewajiban untuk menjamin kedaulatan petani dalam mengelola usahanya serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan sehingga berusaha tani merupakan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan dan dapat menjamin penghidupan yang sejahtera bagi seluruh keluarga petani. Sebagai insan yang bermartabat, menjadi petani harus menjadi pilihan profesi, bukan karena keterpaksaan dan tidak tersedianya pilihan lain untuk bekerja (hlm. 50).

Kegiatan IYFF-2014 didedikasikan untuk mengorganisasikan petani-petani di seluruh dunia (Quintana 2014). Hal ini didukung Siriwardena (1991) yang menyatakan bahwa strategi berorganisasi dari keluarga-keluarga petani menjadi hal pokok (*crucial point*) partisipasi mereka dalam pembangunan. Untuk ini, maka pertanian keluarga membutuhkan keterlibatan dan komitmen berbagai pihak, yaitu organisasi petani, pusat-pusat penelitian, lembaga pendidikan, media, agen-agen pembangunan, dan berbagai otoritas publik lainnya. WRF 2015 menyebarkan panduan

nasional untuk menjalankan sistem pertanian berbasis pertanian keluarga serta proses untuk membangunnya.

### PROSPEK PERTANIAN KELUARGA DAN KELUARGA PETANI KE DEPAN

Sesungguhnya kita menghadapi dua entitas persoalan yang berbeda, yakni antara “pertanian keluarga” dengan “keluarga petani”. Objek pertama berkenaan dengan usaha pertaniannya, sedangkan objek kedua berkenaan dengan aktor atau pelakunya, yakni keluarga petani.

Bertolak dari pemahaman yang agak “longgar” dalam berbagai dokumen sebagaimana dipaparkan di atas, maka jumlah pertanian

keluarga di Indonesia sangat besar dan dominan. Namun, memandang semua pertanian keluarga dalam satu kategori akan menghasilkan pengetahuan yang dangkal. Untuk dapat memahami lebih baik, seluruh pelaku usaha pertanian perlu dibedakan atas tiga kategori yang dibagi atas luas penguasaan lahan, dengan titik batas penguasaan 0,5 ha dan 2,0 ha. Kedua titik batas ini cukup populer dalam kategori statistik di Indonesia, di mana batas 0,5 ha digunakan oleh BPS untuk menyebut batas maksimum “petani gurem”, sedangkan batas 2,0 ha digunakan dalam UU No. 19 tahun 2013 sebagai batas penguasaan maksimum untuk petani yang masuk kategori dilindungi dan diberdayakan.

Kondisi yang dihadapi dan sasaran ke depan untuk memberdayakan pertanian keluarga dapat

Tabel 3. Perbedaan karakteristik dan kebutuhan untuk pengembangan tiga strata pertanian Indonesia

Aspek	Perusahaan pertanian dan pertanian keluarga ukuran “besar”	Pertanian keluarga ukuran “sedang”	Pertanian keluarga gurem
<b>Karakteristik:</b>			
Luas penguasaan lahan	>2 ha	0,5–2 ha	<0,5 ha
Sumber tenaga kerja	Seluruhnya TK upahan dari luar keluarga	TK keluarga ditambah TK upahan	Hanya menggunakan TK dari dalam keluarga
Tipe manajemen dan teknologi	Industrial, dan sebagian intensif	Semiintensif	Agroekologis, organik
Tipe teknologi	Mekanisasi penuh	Semimekanisasi	Mekanisasi rendah, lebih mengutamakan tenaga manusia
Orientasi usaha	Bisnis komersial	Bisnis semi-komersial	Mengutamakan untuk kebutuhan pangan keluarga
Komoditas yang ditanam	Komoditas pasar, ekspor, dll.	Komoditas pasar dan pangan keluarga	Menanam komoditas pangan pokok keluarga
<b>Kebutuhan untuk pengembangannya:</b>			
Kebutuhan lahan	Membeli dan sewa (HGU tanah negara)	Lahan pribadi	Lahan terlalu sempit, butuh perluasan, kepastian hak, dll.
Kebutuhan modal	Bunga komersial ke perbankan	Butuh subsidi	Butuh subsidi
Kebutuhan benih	Mampu memproduksi sendiri	Butuh subsidi	Butuh subsidi
Kebutuhan pupuk dan obat-obatan	Mandiri, membeli dgn harga komersial	Harga disubsidi	Subsidi lebih besar
Kebutuhan teknologi	Memiliki unit riset sendiri	Mengandalkan pemerintah	Butuh riset dengan pendekatan berbeda
Kebutuhan informasi	Sudah mandiri	Penyuluhan dan media massa	Penyuluhan lebih banyak dan pemberdayaan
Organisasi	Hanya butuh asosiasi	Butuh organisasi (kelompok tani, Gapoktan, koperasi)	Butuh organisasi yang berbeda



menggunakan kategori di atas. Untuk petani dengan luas >2 ha misalnya yang tidak dicakup dalam UU No. 19 tahun 2013 karena dipandang sebagai petani yang sudah mandiri, namun di dalamnya melibatkan para buruh tani yang tidak menjadi objek perlindungan.

Satu prasyarat penting untuk kesejahteraan keluarga petani adalah berapa luas penguasaan lahan minimal sehingga tercapai pendapatan yang tidak tergolong sebagai kelompok miskin. Penelitian Nazam et al. (2011) untuk petani padi di NTB mendapatkan angka 0,73 ha per KK agar dapat hidup layak. Jika didasarkan atas Garis Kemiskinan BPS September 2013, batas pengeluaran RT di wilayah perdesaan adalah Rp275.779/kapita/bulan. Sementara, World Bank menetapkan angka pengeluaran US\$1,25/kapita/hari. Jika rata-rata anggota keluarga adalah 5 orang per rumah tangga, maka lahan yang dibutuhkan adalah sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penguasaan lahan milik sendiri minimal per keluarga agar tidak jatuh ke dalam kelompok miskin menurut garis BPS adalah 0,38 sampai 0,66 ha untuk pola tanam yang berbeda. Apabila menggunakan ukuran garis kemiskinan menurut Bank Dunia, dibutuhkan lahan minimal 0,61 sampai 1,07 ha per keluarga.

Perhatian kepada pertanian keluarga penting di Indonesia, namun banyak tantangan dan kendala, yakni pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, konversi lahan sawah akibat perencanaan tata ruang yang tidak baik,

juga dukungan teknologi dan mekanisasi yang masih lambat (Septiani 2015). Untuk memperkuat pertanian keluarga dibutuhkan gerakan (*movements*) untuk meningkatkan pengaruhnya kepada pengambil kebijakan, kelembagaan dan pasar, untuk akses yang terjamin kepada sumber daya yang mereka butuhkan, juga kebutuhan jaminan terhadap kebijakan yang inklusif dan positif kepada kelompok marginal (perempuan, petani muda, masyarakat adat, dan lain-lain).

Tugas pemerintah ke depan adalah mempromosikan pertanian agroekologis berkelanjutan dalam kerangka kerja pertanian keluarga. Bersamaan dengan itu adalah juga menjamin akses pertanian keluarga kepada akses dan kontrol terhadap sumber daya pertanian, akses pada pasar, mempromosikan perempuan dan kesetaraan gender, memperkuat organisasi pertanian keluarga, dan mempromosikan kepada generasi muda (*Family Farming Organizations 2011*). Menurut Asin (2014), hal yang dibutuhkan adalah keterlibatan dan komitmen semua pihak, pendidikan publik dan advokasi, promosi kebijakan, peningkatan infrastruktur dan pelayanan di perdesaan, dukungan langsung untuk perempuan melalui investasi, kredit, *land titling*, dan lain-lain; peningkatan penyerapan tenaga kerja perdesaan terutama kalangan muda, penelitian pertanian, pelatihan untuk peningkatan kapasitas, dan peningkatan kesadaran sosial tentang peran pertanian keluarga.

Dukungan yang dibutuhkan di Indonesia adalah investasi pertanian agroekologis, memberi perhatian pada kearifan lokal,

Tabel 4. Luas penguasaan lahan minimal per rumah tangga petani untuk keluar dari garis kemiskinan

Aspek	Satuan	Garis BPS <sup>1</sup>	Garis World Bank <sup>2</sup>
Batas garis kemiskinan	Rp/kap/bulan	275.779	450.000
Jumlah anggota keluarga	orang/RT	5	5
Pendapatan minimal per tahun	Rp/RT	16.546.740	27.000.000
Keuntungan usaha tani padi	Rp/ha	12.602.000	12.602.000
Keuntungan usaha tani jagung	Rp/ha	18.720.000	18.720.000
Keuntungan usaha tani kedelai	Rp/ha	5.365.200	5.365.200
Pendapatan usaha tani:			
padi-padi-bera	Rp/tahun/ha	25.204.000	25.204.000
padi-padi-jagung	Rp/tahun/ha	43.924.000	43.924.000
padi-padi-kedelai	Rp/tahun/ha	30.569.200	30.569.200
Kebutuhan lahan minimal per RT:			
padi-padi-bera	ha/RT	0,66	1,07
padi-padi-jagung	ha/RT	0,38	0,61
padi-padi-kedelai	ha/RT	0,54	0,88

Sumber: Data primer (hasil analisis sendiri), <sup>1</sup>BPS (2013), <sup>2</sup> Jolliffe D, Prydz EB. (2016)

memberi akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, serta memperkuat organisasi tani. Konsep “petani kecil” juga mesti masuk secara tegas dalam kebijakan dan menjadi agenda penting pemerintahan. Laporan IFPRI dan ODI (2005) berjudul “*The Future of Small Farms*” menyebutkan bahwa “... *small farmers have a future but will need a variety of technological and nontechnological interventions to overcome the challenges they face*”. Petani kecil membutuhkan kreativitas untuk menciptakan teknologi dan kelembagaan yang sesuai dengan mereka.

Dari sisi kebijakan, sudah cukup banyak landasan kebijakan untuk memperkuat pertanian keluarga. Dalam UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, terutama setelah tahun 2013 dengan dikabulkannya uji materil oleh mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan revisi untuk Pasal 9 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1. Dengan revisi ini, maka perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah serta mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah.

Lalu, UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana “Petani” dibatasi sebagai penggarap maksimal 2 ha, petani pemilik maksimal 2 ha, serta petani kebun, hortikultura dan lain-lain lain yang ditetapkan khusus oleh menteri (Pasal 12 ayat 2). Dalam pengertian ini buruh tani tak bertanah (petani tunakisma) bukan kelompok yang dilindungi. Implikasinya, mereka juga tidak termasuk yang akan diberdayakan pemerintah.

Buruh tani juga tidak termasuk sebagai buruh atau “tenaga kerja”, karena dalam UU No. 13 tahun tentang Ketenagakerjaan tidak ada *entry* kata untuk “petani”, dan “buruh tani”, dan “tenaga kerja pertanian”. Bertolak dari Pasal 1 di mana “*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”, maka buruh tani semestinya termasuk. Namun, pekerja atau buruh yang diperhatikan dalam konteks ini adalah yang bekerja pada usaha formal yang terdaftar. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga tidak memuat kata “petani”, “buruh tani”, dan “pertanian”.

Pemahaman mengenai petani yang lebih luas tercantum dalam Agenda 21 (United Nation 1992) sebagai berikut: “... *all references to "farmers" include all rural people who derive their livelihood from activities such as farming, fishing and forest harvesting. The term "farming" also includes fishing and forest harvesting.*”

Agenda 21 adalah program aksi dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 178 negara, termasuk Indonesia, ketika diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Sementara, dalam *Farm Practices Protection (Right to Farm) Act (RSBC1996) Chapter 131*, “*farmer*” didefinisikan sebagai “*the owner or operator of a farm business*”. Artinya, buruh tani tak bertanah yang menggantungkan hidup dengan menjual tenaga dan mendapat upah harian adalah juga petani.

Salah satu sumber dukungan tak langsung untuk eksistensi pertanian keluarga adalah konsep dari “perdagangan adil” (*fair trade*). Namun, sayangnya kebijakan perdagangan yang baru yakni UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tidak memuat *entry* “perdagangan yang adil”. Namun demikian, pada Pasal 2 tertulis bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas “adil dan sehat”.

Perdagangan berkeadilan (*fair trade*) merupakan sistem perdagangan alternatif yang menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional. Idenya diawali dari tata perdagangan di level dunia, namun prinsip ini juga relevan untuk diterapkan pada level lokal. Sistem perdagangan adil timbul sebagai reaksi terhadap sistem perdagangan bebas yang meminggirkan petani dan perajin di negara berkembang. Perbedaan utama dengan konsep “perdagangan bebas” (*free trade*) adalah karena *fair trade* lebih luas dari hanya sekedar aspek ekonomi, namun juga mencakup pertimbangan kemanusiaan dan lingkungan.

Setiap barang yang diperdagangkan harus memperoleh label yang diterbitkan beberapa organisasi sertifikat perdagangan berkeadilan (*fairtrade certifiers*) yaitu Fairtrade International (sebelumnya dikenal dengan Fairtrade Labelling Organizations International), IMO, dan Eco-Social. Beberapa prinsip perdagangan berkeadilan yang sejalan dengan pertanian keluarga di antaranya sebagai berikut (WFTO 2013): (1) menciptakan peluang bagi produsen kecil; (2) tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun peduli pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi produsen kecil; (3) adil dalam pembayaran; (4) tidak memperkerjakan anak-anak dan buruh paksa; (5) mengutamakan kesetaraan gender dan kebebasan berserikat bagi produsen; (6) memiliki tempat kerja yang sehat; (7) meningkatkan kapasitas produsen; dan (8) menghormati keseimbangan ekologis.

Konsep perdagangan berkeadilan tidak hanya memperhatikan komoditas yang

diperdagangkan dan pedagangnya, namun juga produsen. Semangat awalnya adalah untuk melindungi produsen lemah di negara berkembang. Produsen kecil dibela sehingga tetap dapat hidup dan mengambil untung dari sistem perdagangan yang berjalan.

### USULAN RUMUSAN INDEKS PERTANIAN KELUARGA

Sampai saat ini belum ada pihak yang secara resmi mengeluarkan pedoman bagaimana mengukur pertanian keluarga, baik sebagai dokumen program maupun hasil penelitian. Sebuah indeks yang disusun dari variabel, indikator, serta bobot dan skor sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur kemajuan, sekaligus juga sebagai pedoman untuk penyusunan program. Sebagai sebuah konsep yang relatif baru, saat ini berbagai pihak sedang menggali bagaimana karakteristik pertanian keluarga pada berbagai wilayah di dunia dengan berbagai metode (Suess-Reyes dan Fuetsch 2016), dan dapat menjadi bahan untuk penyusunan indeks tersebut.

Dari studi di kawasan Eropa dan Asia Tengah, karakteristik pertanian keluarga menurut van der Ploeg (2016) terdiri atas enam kriteria, yaitu (1) keluarga memiliki kontrol yang efektif terhadap sumber daya utama pertanian yang digunakan; (2) tenaga kerja dari dalam keluarga memainkan peranan yang penting (*pivotal role*) dalam manajemen usaha tani; (3) mampu meningkatkan kesejahteraan petani-nya; (4) berkontribusi positif kepada ekonomi lokal dan wilayah; (5) membangun dan memperkaya ekosistem lokal (*local ecosystems*); dan (6) menghindari relasi yang berlawanan (*antagonistic relations*) dengan entitas pertanian keluarga lainnya. Kata kunci dari ciri pertanian keluarga yang ditemukannya adalah pembangunan yang inklusif (*inclusive development*).

Sebaliknya, juga dipaparkan temuan tentang ciri pertanian skala besar yang sangat berbeda dengan pertanian keluarga, yaitu (1) beroperasi pada kawasan perbukitan dan pegunungan yang berdampak negatif kepada biodiversitas dan ekologis; (2) menyebabkan pengurangan secara masif tenaga kerja produktif di desa; (3) menerapkan pertanian monokultur dengan input eksternal tinggi dan penggunaan obat-obatan sehingga menyebabkan pemanasan global, berkurangnya biodiversitas, polusi air, dan mengancam kesehatan publik; (4) meningkatkan risiko bagi kesehatan hewan dan tanaman;

(5) mengancam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan; dan (6) mendegradasi kehidupan perdesaan.

Dari referensi yang lain, ciri dari pertanian keluarga menurut FAO (2017) adalah sistem pertanian yang tidak monokultur (*diversified agricultural systems*), menyediakan pangan tradisional (*preserve traditional food products*), berkontribusi kepada keseimbangan antara jumlah yang dikonsumsi dengan penyelamatan agribiodiversitas (*contributing both to a balanced diet and the safeguarding of the world's agrobiodiversity*), melekat pada jaringan komunitas dan kultur lokal (*embedded in territorial networks and local cultures*), menggunakan pendapatan untuk ekonomi setempat (*spend their incomes mostly within local and regional markets*), serta menggerakkan pertanian dan sekaligus pekerjaan nonpertanian (*generating many agricultural and non-agricultural jobs*).

Berkenaan dengan upaya penyusunan indeks, ada banyak referensi bagaimana menyusun indeks yang baik. Sebuah indeks setidaknya mengandung prinsip "*wholeness*" yakni mencakup keseluruhan sisi objek yang diukur, "*exhausiveness*" yakni terpisah dengan jelas antarindikator, juga terukur atau mudah diukur, dan hasilnya pengukurannya berpotensi cukup menyebar. Secara prinsip, sesuai dengan referensi yang banyak digunakan, pertanian keluarga mestilah memenuhi empat pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar kultural (Woodley et al. 2009). Dengan demikian, indeks yang penulis usulkan untuk mengukur pertanian keluarga adalah seperti yang dipaparkan pada Tabel 5.

Nilai akhir indeks adalah rekapitulasi dari kesepuluh variabel di atas, di mana seluruhnya merupakan variabel tunggal. Variabel terdiri atas dua jenis, yaitu (1) angka rasio dari angka statistik (tingkat skala rasio) berupa hasil bagi atas luas lahan, nilai (Rupiah), dan jumlah hari orang kerja (HOK); dan (2) jawaban kategorial dari persepsi narasumber yang dikelompokkan atas kategori sedang, rendah, dan tinggi.

Indeks di atas mencakup berbagai segi dari pertanian keluarga, mulai dari input, proses, output, dan dampaknya. Tenaga kerja keluarga merupakan indikator yang sangat penting dalam pertanian keluarga. Penelitian Johnsen (2004) di Selandia Baru tentang respons pertanian skala kecil dalam melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja menemukan satu kesejajaran dengan evolusi norma-norma kultural lokal (*local cultural norms*).

Tabel 5. Indeks pertanian keluarga beserta indikator, variabel, dan metode pengukurannya

Indikator	Variabel yang diukur	Metode pengukuran dan satuan	Nilai
1. Keefektifan kontrol rumah tangga petani terhadap sumber daya lahan pertanian	Rasio penguasaan petani antara sumber daya pertanian yang dikuasai terhadap total sumber daya pertanian yang digunakan (variabel tunggal)	Luas lahan yang dikuasai dibagi dengan total nilai lahan yang digunakan (ha)	0–1
2. Penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha tani	Rasio jumlah tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga dengan total penggunaan seluruh tenaga kerja dalam usaha tani (variabel tunggal)	Jumlah HOK dari dalam keluarga dibagi total HOK dalam usaha tani (HOK)	0–1
3. Peran usaha pertanian terhadap kesejahteraan keluarga	Rasio pendapatan dari usaha pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga dari seluruh sumber pendapatan (variabel tunggal)	Pendapatan dari pertanian dibagi dengan total pendapatan rumah tangga (Rp)	0–1
4. Kontribusi pertanian terhadap pengembangan ekonomi lokal dan wilayah	Rasio peran pertanian terhadap ekonomi lokal dan wilayah dibandingkan terhadap total kontribusinya (variabel tunggal)	Nilai PDRB pertanian dibagi dengan total PDRB wilayah (Rp)	0–1
5. Kontribusi terhadap pembangunan dan pemeliharaan ekosistem lokal	Tingkat keterlibatan dalam menjaga dan mengembangkan ekosistem lokal (variabel tunggal)	Jumlah jawaban dari persepsi nara-sumber, dikelompokkan atas kategori rendah, sedang, dan tinggi (%)	1–3 (1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)
6. Relasi dengan sesama pertanian keluarga lainnya	Tingkat relasi berupa kerja sama input, usaha, produk, pemasaran, dll (variabel tunggal)	Jumlah jawaban dari persepsi nara-sumber, dikelompokkan atas kategori rendah, sedang, dan tinggi (%)	1–3 (1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)
7. Kontribusi usaha pertanian terhadap golongan marjinal (perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, dll.)	Rasio kontribusi usaha pertanian terhadap golongan marjinal dibandingkan dengan kontribusi total yang diberikan (variabel tunggal)	Jumlah serapan tenaga kerja pertanian untuk kelompok marginal dibagi potensial serapan (HOK)	0–1
8. Kontribusi terhadap kesetaraan gender	Tingkat kontribusi dalam memperbaiki kesetaraan gender (variabel tunggal)	Jumlah jawaban dari persepsi nara-sumber, dikelompokkan atas kategori rendah, sedang, dan tinggi (%)	1–3 (1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)
9. Kesejahteraan keluarga petani	Rasio keluarga petani yang sejahtera dibandingkan seluruh keluarga petani dalam satu wilayah (variabel tunggal)	Jumlah rumah tangga sejahtera dibagi total rumah tangga (%)	0–1
10. Sumbangan usaha pertanian terhadap sosio kultural masyarakat (pengetahuan lokal, adat istiadat, dll.)	Tingkat kontribusi dalam menjaga dan mengembangkan sosiokultural masyarakat (variabel tunggal)	Jumlah jawaban dari persepsi nara-sumber, dikelompokkan atas kategori rendah, sedang, dan tinggi (%)	1–3 (1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi)

Demikian pula dengan input ramah lingkungan. Studi Rey (2015) pada sistem pertanian pegunungan di Romania yang didominasi oleh pertanian keluarga mendapatkan ciri absennya penggunaan input kimia sehingga menghasilkan lingkungan yang sehat (*unpolluted environment*). Selanjutnya, studi Baležentis dan De Witte (2015) yang mempelajari efisiensi pertanian keluarga yang diukur dengan *partial frontiers and Multi-Directional Efficiency Analysis* (MEA) di Lituania menemukan bahwa tren waktu memberi dampak positif, sedangkan subsidi memberi dampak negatif kepada total output usaha. Faktor waktu berperan positif karena adanya peningkatan intensitas penggunaan tenaga kerja dalam usaha tani.

## PENUTUP

Wacana dan gerakan pertanian keluarga di Indonesia saat ini masih pada tahap advokasi kepada lembaga pemerintah, melalui dukungan lembaga internasional, terutama organisasi Food and Agricultural Organization (FAO) dan World Rural Forum (WRF). Ide dan gerakan pertanian keluarga telah diterima dan menjadi komitmen dunia internasional sebagai objek sekaligus strategi untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan pertanian dan perdesaan yang selama ini telah menarik perhatian dan agenda pemerintah, yakni penyediaan pangan, pertanian berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi keilmuan, objek pertanian keluarga juga belum banyak dipahami, apalagi dengan kesadaran bahwa kondisi dan permasalahan di setiap negara cenderung berbeda. Untuk Indonesia, sesuai dengan karakteristik pertanian dipadukan dengan batasan-batasan yang sudah populer digunakan, maka pertanian keluarga dapat dibedakan atas tiga kategori, yakni pertanian keluarga dengan penguasaan di bawah 0,5 ha, antara 0,5 sampai 2,0 ha, dan di atas 2,0 ha. Ketiga entitas ini memiliki kondisi dan permasalahan berbeda sehingga membutuhkan dukungan yang berbeda pula.

Untuk dapat membantu dalam penyusunan program sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi secara terukur dan sistematis, maka dibutuhkan satu rumusan indeks pertanian keluarga yang nantinya bisa disepakati oleh semua pihak sebagai pedoman bersama. Dengan didasarkan atas referensi dan diskusi yang berkembang, maka indeks pertanian keluarga mencakup berbagai indikator yang lengkap dengan menggabungkan aspek input,

proses, serta output dan dampak dari keberadaan pertanian keluarga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagai pengelola jurnal serta Dewan Redaksi dan Redaksi Pelaksana yang telah memberikan saran perbaikan serta melayani penyempurnaannya. Demikian pula, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyediaan data, informasi, serta pengetahuan dan temuan-temuan studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asin A. 2014. Family farming: feeding the world, caring for the earth [Internet]. [cited 2016 Jan 17]. Available from: <http://www.astc.org/astc-dimensi-ons/family-farming-feeding-the-world-caring-for-the-earth/>.
- Baležentis T, De Witte K. 2015. One-and multi-directional conditional efficiency measurement – efficiency in Lithuanian family farms. *Eur J Oper Res.* 245(2):612-622.
- Bastian CT. 2011. Family farming: a new economic vision. *Am J Agric Econ.* 93(1):247-249. doi:10.1093/ajae/aaq127
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Indonesia: sensus pertanian 2003. Jakarta (ID): Biro Pusat Statistika.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Garis kemiskinan [Internet]. [diunduh 2016 Okt 19]. Tersedia dari: <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Laporan hasil sensus pertanian 2013: pencacahan lengkap [Internet]. [diunduh 2016 Mar 9]. Tersedia dari: <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf>
- Berdegue J. 2000. Systems-oriented agricultural extension and advisory services for small farmers in Latin America. Santiago (CL): RIMISP.
- Darnhofer I, Lamine C, Strauss A, Navarrete M. 2016. The resilience of family farms: towards a relational approach. *J Rural Stud.* 44:111-122
- [FFO] Family Farming Organizations. 2011. Final declaration family farming world conference: feeding the world, caring for the earth; 2011 Oct 5-7; Bilbao, Spain [Internet]. [cited 2015 Feb 11]. Available from: [http://www.wocan.org/sites/default/files/final\\_declaration.pdf](http://www.wocan.org/sites/default/files/final_declaration.pdf)

- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2011. Women in agriculture: closing the gender gap for development [Internet. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations]; [cited 2016 Feb 11]. Available from: <http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf>
- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2014. The future of family farming: empowerment and equal rights for women and youth [Internet]. Discussion Paper. Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum). Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations; [cited 2015 Oct 11]. Available from: <http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/family-farming>
- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2017. Family farming knowledge platform. [Internet]. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations; [cited 2015 Oct 10]. Available from: <http://www.fao.org/family-farming/background/en/>.
- Gregor HF. 1982. Large-scale farming as a cultural dilemma in U.S. rural development—the role of capital. *Geoforum*. 13(1):1-10.
- Hill B. 1993. The 'myth' of the family farm: defining the family farm and assessing its importance in the European community. *J Rural Stud*. 9(4):359-370.
- [IFAD] International Fund for Agricultural Development. 2016. The international year of family farming+10: strengthening common action in favor of family farming after the IYFF [Internet]. Side event organized by WRF, AFA, COPROFAM; 2016 Feb 18. [cited 2015 Feb 11]. Available from: <https://www.ifad.org/documents/10180/cd380f68-d78e-4e40-b768-60af1d3ad430>
- [IFPRI] International Food Policy Research Institute and [ODI] Overseas Development Institute. 2005. The future of small farms [Internet]. Proceedings of a Research Workshop; 2005 Jun 26-29; Wye, United Kingdom. Jointly organized by International Food Policy Research Institute (IFPRI)/2020 Vision Initiative Overseas Development Institute (ODI). London (UK): Imperial College; [cited 2016 Mar 9]. Available from: <http://iri.columbia.edu/~jhansen/Sonja/10.1.1.139.3719.pdf>
- Johnsen S. 2004. The redefinition of family farming: agricultural restructuring and farm adjustment in Waihemo, New Zealand. *J Rural Stud*. 20(4):419-432.
- Jolliffe D, Prydz EB. 2016. Estimating international poverty lines from comparable national thresholds. World Bank Group, Policy Research Working Paper. Development Research Group Poverty and Inequality Team. March 2016. [Internet]. [cited 2016 Mar 11]. Available from: <http://documents.worldbank.org/curated/en/837051468184454513/pdf/WPS7606.pdf>
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2016. Strategi induk pembangunan pertanian (SIPP) 2015–2045. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian
- Leavy J, Smith S. 2010. Future farmers: youth aspirations, expectations and life choices. Discussion Paper 013, June 2010 [Internet]. [cited 2016 Mar 9]. Available from: [www.future-agricultures.org](http://www.future-agricultures.org)
- Lowder SK, Skoet J, Singh S. 2014. What do we really know about the number and distribution of farms and family farms worldwide? Background paper for the State of Food and Agriculture 2014. ESA Working Paper No. 14-02. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Medina G, Almeida C, Novaes E, Godar J, Pokorny B. 2015. Development conditions for family farming: lessons from Brazil. *World Dev*. 74:386-396.
- Nazam M, Sabiham S, Pramudya B, Widiatmaka, Rusastra IW. 2011. Penetapan luas lahan optimum usahatani padi sawah mendukung kemandirian pangan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *J Agro Ekon* 29(2): 113–145
- Petrini MA, Rocha JV, Brown JC, Bispo RC. 2016. Using an analytic hierarchy process approach to prioritize public policies addressing family farming in Brazil. *Land Use Policy*. 51:85-94.
- Quintana C. 2014. Family farming: feeding the world, caring for the earth. *Dimensions*, March/April 2014 [Internet]. [cited 2015 Apr 1]. Available from: <http://www.astc.org/astc-dimensions/family-farming-feeding-the-world-caring-for-the-earth/>.
- Rey R. 2015. New challenges and opportunities for mountain agri-food economy in South Eastern Europe. A scenario for efficient and sustainable use of mountain product, based on the family farm, in an innovative, adapted cooperative associative system – horizon 2040. *Procedia Econ Finance*. 22:723-732.
- Roudart L, Dave B. 2017. Land policy, family farms, food production and livelihoods in the Office du Niger area, Mali. *Land Use Policy*. 60:313-323.
- Septiani P. 2015. Family farming: the case of Indonesia. *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali* 133° [Internet]. [cited 2016 Mar 9]; 39(2):251-2. Available from: Error! Hyperlink reference not valid.
- Seuneke P, Bock BB. 2015. Exploring the roles of women in the development of multifunctional entrepreneurship on family farms: an entrepreneurial learning approach. *Wageningen J Life Sci*. 74-75:41-50.
- Siriwardena SSAL. 1991. Social reality of people's participation: some experience of people's participation in a revolving fund for sustainable family farming in a Sri Lanka irrigation settlement. *Landsc Urban Plan*. 20(1-3):123-128.
- Suess-Reyes J, Fuetsch E. 2016. The future of family farming: a literature review on innovative, sustainable and succession-oriented strategies. *J Rural Stud*. 47:117-140.

- Toader M, Roman GV. 2015. Family farming: examples for rural communities development. *Agric Agric Sci Procedia*. 6:89-94.
- United Nations. 1992. Agenda 21: United Nations Conference on Environment and Development; 1992 Jun 3-14; Rio de Janeiro, Brazil [Internet]. [cited 2016 Mar 9]. Available from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- van der Ploeg JD. 2016. Family farming in Europe and Central Asia: history, characteristics, threats and potentials. Working Paper No. 153. Brasilia (BR): UNDP-International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Woodley E, Crowley E, de Pryck JD, Carmen A. 2009. Cultural indicators of indigenous peoples' food and agro-ecological systems. SRAD Initiatives. E/C.19/2009/CRP. 3. [Internet]. [cited 2016 Mar 9]. Available from: [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E\\_%20C\\_19\\_2009\\_CRP3\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_%20C_19_2009_CRP3_en.pdf)
- [WFTO] World Fair Trade Organizations. 2013. 10 principles of fair trade [Internet]. WR Culemborg (NL): World Fair Trade Organizations. [cited 2016 Mar 9]. Available from: [http://www.wfto.com/sites/default/files/10-FAIR-TRADE-PRINCIPLES-2013-\(Rio-AGM-and-EGM-2013-approved-modifications\).pdf](http://www.wfto.com/sites/default/files/10-FAIR-TRADE-PRINCIPLES-2013-(Rio-AGM-and-EGM-2013-approved-modifications).pdf)
- [WRF] World Rural Forum. 2015. Terms of reference for the national guidelines for the governance of agricultural systems based on family farming. Alava (ES): World Rural Forum.
- [WRF] World Rural Forum. 2016. We need better public policies for family farming! [Internet]. Alava (ES): World Rural Forum. [cited 2016 Mar 9]. Available from: <https://www.ruralforum.net/en/news/2016/10/we-need-better-public-policies-for-family-farming>.